



Studi Akuntabilitas Yayasan di Nusa Tenggara Barat

M. Ali Fikri*, Sapto Hendri BS, Siti Atikah, Elin Erlina Sasanti

Universitas Mataram, Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
83115

Email Korespondensi: fikri.sampala@unram.ac.id

Abstrak

Organisasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan individu dan kelompok di sekitarnya seperti konsumen, kreditur, dan pemerintah. Semua pihak baik secara langsung atau tidak langsung menentukan kelangsungan hidup organisasi, termasuk organisasi sosial seperti yayasan. Permasalahan yang sering dijumpai dilapangan terkait kritik akuntabilitas yayasan yang sering kali kurang, terutama dalam hal akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan yakni berupa analisis survey penelusuran dokumen secara *online* yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Ditemukan bahwa yayasan cenderung menyajikan akuntabilitas mengenai kegiatan yang akan dan telah mereka lakukan serta lingkup organisasi secara umum. Sebanyak 375 NGO yang terdaftar sejak tahun 2014 sampai 2020 sedangkan pada tahun 2022 terdapat sejumlah 362 yayasan yang memperoleh bantuan namun tidak menyajikan akuntabilitas keuangan organisasi secara terbuka ke publik.

Kata kunci: Akuntabilitas, Organisasi, Keuangan.

Foundation Accountability Study in West Nusa Tenggara

Abstract

Organizations cannot be separated from the existence of individuals and groups around them such as consumers, creditors and the government. All parties either directly or indirectly determine the survival of the organization, including social organizations such as foundations. The problems that are often encountered in the field are related to criticism of foundation accountability which is often lacking, especially in terms of financial accountability. The method used is in the form of an online document search survey analysis in West Nusa Tenggara. It was found that foundations tend to present accountability regarding the activities they will and have undertaken and the scope of the organization in general. A total of 375 NGOs have been registered from 2014 to 2020, while in 2022 there were a total of 362 foundations that received assistance but did not present their organizational financial accountability openly to the public.

Keywords: Accountability, Organization, Finance.

How to Cite: Fikri, M. A., BS, S. H., Atikah, S., & Sasanti, E. E. (2023). Studi Akuntabilitas Yayasan di Nusa Tenggara Barat. *Empiricism Journal*, 4(1), 120–124. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1288>



<https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1288>

Copyright© 2023, Fikri, et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut sebagai Non Governmental Organization (NGO) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik atau good governance. Di berbagai negara demokrasi, salah satu peran penting dimainkan oleh NGO adalah menjadi kolaborator pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat luas. NGO seringkali menjalankan fungsi-fungsi advokasi untuk menghadirkan keadilan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh negara. NGO sebagai institusi, dipercaya dalam menyalurkan program bantuan pembangunan dinilai jauh lebih independen, lebih responsif dan fleksibel serta memiliki kredibilitas tinggi dibandingkan bila penyaluran program bantuan dilakukan melalui pemerintah yang dinilai cenderung birokratis dan kurang responsif (Yasin, 2022).

Bigitu juga dalam konteks Indonesia, kelahiran dan pertumbuhan NGO juga telah lama berlangsung. Hampir seluruh isu publik pun menjadi perhatian dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Mulai dari isu demokratisasi, sosial politik, ekonomi, pendidikan, lingkungan hingga kesehatan. NGO dikenal sebagai garda terdepan dalam melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepentingan

publik secara luas. Pada masa itu, dapat dikatakan NGO menjadi medium utama yang dapat menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah (Brown, 2021). Kehadiran NGO dapat dikatakan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan partisipasi politik publik secara luas. Akan tetapi, kehadiran dari NGO juga bisa berdampak negatif apabila tidak diikuti oleh sebuah manajerial yang transparan dan akuntabel serta juga mengabaikan tujuan dan nilai manfaat yang jelas bagi publik secara luas.

Pada era seperti saat ini tidak sedikit NGO terkesan asal terbentuk tanpa diikuti oleh hal-hal tersebut di atas. sehingga, seringkali mereka mengalami kesulitan pendanaan kehilangan lembaga donor karena program yang mereka jalankan dinilai kurang bermanfaat bagi publik secara luas. Lebih lanjut, kondisi kemudian mendorong mereka untuk berpikir ulang, apakah harus tetap non-profit organization menjadi profit organization demi keberlangsungan hidup di masa mendatang. Perubahan dari non-profit organization menjadi profit organization inilah yang di kemudian hari menuai kritik luas dari berbagai pihak.

Peran NGO yang semula bersifat independen dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan publik secara luas, menjadi mulai dipertanyakan oleh publik itu sendiri. Tidak berhenti di sana, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana NGO pun mengemuka menjadi perbincangan hangat di ruang-ruang publik. Selama ini mereka selalu menyuarakan akuntabilitas dan transparansi terhadap setiap kebijakan maupun pengelolaan anggaran dilakukan oleh pemerintah, tetapi lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu sendiri juga tidak memberlakukan akuntabilitas dan transparansi terhadap diri mereka sendiri. Padahal, akuntabilitas dan transparansi bukan hal sulit untuk dilakukan sebuah organisasi selama memiliki kapasitas dan kemauan untuk merealisasikan hal tersebut (Gibelman dan Gelman, 2001; Ebrahim, 2003; Kovach *et al.*, 2003; Kaldor, 2003; Goddard dan Assad, 2006; Bendell, 2006; Gray *et al.*, 2006; dan Yasin, 2022). Sebagai contoh, apabila sebuah NGO mendapatkan dana berasal dari lembaga donor, maka harus memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi (Lehman, 1999, 2005).

Ini disebabkan oleh tujuan NGO mengatasi persoalan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat, namun dalam praktiknya mekanisme akuntabilitas NGO masih lemah (Brown dan Moore, 2001; Fries, 2003; Johnson, 2009). Di lain pihak bagaimana seharusnya praktik akuntabilitas NGO masih merupakan pertanyaan dan menjadi perdebatan (Ebrahim, 2003; Gray *et al.*, 2006). Lemahnya akuntabilitas NGO ini misalnya, tampak pada laporan yang hanya ditujukan kepada donatur (Ebrahim, 2003; Goddard dan Assad, 2006), minimnya penyajian informasi mengenai aktivitas organisasi kepada masyarakat (Kovach *et al.*, 2003), dan kurangnya pengawasan distribusi dana (Dixon *et al.*, 2006). Hal ini disinyalir disebabkan oleh banyaknya skandal dan penyalahgunaan wewenang oleh NGO (Gibelman dan Gibelman, 2001).

Seperti diketahui kebanyakan NGO memiliki hubungan baik dengan masyarakat yang tidak ditemui dalam organisasi komersial. Interaksi antara NGO, donatur, dan masyarakat bukan semata-mata murni hubungan ekonomi serta tidak selalu bersifat formal (meskipun terkadang terdapat hubungan formal). Kepercayaan, emosi, kata hati, kontrak sosial, hubungan timbal balik, bercampur sehingga aturan formal untuk menentukan apakah organisasi akuntabel atau tidak sering kali menjadi bias (Parker dan Gould, 2000; Gray *et al.*, 2006; Goddard dan Assad, 2006).

Beberapa penelitian tentang akuntabilitas NGO telah dilakukan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Gibelman dan Gelman (2001), Kovach *et al.* (2003), Dixon *et al.* (2006), dan Goddard dan Assad (2006). Gibelman dan Gelman (2001) yang meneliti skandal NGO menggunakan metode *documented qualitative content analysis* menemukan bahwa sebagian besar permasalahan yang dihadapi NGO berasal dari internal organisasi; Kovach *et al.* (2003) mengukur akuntabilitas organisasi kebijakan dan akses informasi. Dixon *et al.* (2006) meneliti akuntabilitas penyaluran dana bergulir oleh organisasi; Goddard dan Assad (2006) menemukan akuntansi hanya digunakan sebagai media pelaporan kepada donatur yang disebut sebagai fenomena mekanisme regulator.

Menurut teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) perusahaan merupakan media yang dikelola *agent* yang disewa *principal* untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya menurut teori *stakeholder*, *agent* disewa oleh *principal* tidak hanya dituntut bertanggung jawab kepada pihak *principal* (donor) saja namun lebih luas meliputi masyarakat yang terlibat (Power, 1991; Atack, 1999; Kovach *et al.*, 2003; Goddard, 2004). Berdasarkan pemikiran di atas, dikembangkan pemikiran akuntabilitas NGO yang mengacu kepada teori *stakeholder*. NGO sebagai pelaksana kegiatan tidak hanya dituntut bertanggung jawab kepada donatur sebagai *principal*, tetapi juga kepada masyarakat yang terlibat, baik secara formal maupun moral. Penelitian ini dilakukan pada organisasi NGO di NTB menggunakan metode survey online melalui situs NGO yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk menganalisis permasalahan organisasi.

METODE

Penelitian bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas NGO karena terdapat banyak kritik dan masukan yang berasal dari pihak sehubungan dengan akuntabilitasnya. Untuk memahami akuntabilitas sebagai sebuah konsep yang penting bagi NGO dan *stakeholder*, diperlukan metode penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (2016) menyatakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017), di mana penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan yang dikumpulkan secara subjektif (Creswell & Guetterman, 2018).

Sukmadinata (2017) strategi metode dalam penelitian kualitatif secara umum terbagi menjadi interaktif dan non interaktif. Penelitian ini dilakukan pada organisasi NGO menggunakan pendekatan kualitatif non interaktif berupa analisis dokumen atau studi pustaka survey *online* melalui situs NGO yang ada di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Penelusuran dilakukan dengan mencari data akuntabilitas organisasi, terutama data publikasi laporan keuangan organisasi pada situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran dokumen melalui situs website yang dilakukan, ditemukan sejumlah 375 NGO yang terdaftar sejak tahun 2014 s/d 2020 dan pada tahun 2022 terdapat sejumlah 362 yayasan yang memperoleh bantuan dana sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah

Tabel 1. Jumlah Yayasan/Ponpes/Lembaga Pendidikan/Sosial Lainnya Penerima Hibah Uang Tahun 2022 di NTB

No	Yayasan/Ponpes/Lembaga Pendidikan/ Sosial Lainnya	Jumlah	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Yayasan / Pondok Pesantren	174	14.755.000.000
2	Madrasah Diniyah	7	370.000.000
3	RA/PAUD/KB/TK	45	2.115.000.000
4	MI/SD Islam	45	3.290.000.000
5	MTs/SMP Islam	34	2.420.000.000
6	MA	1	20.000.000
7	Perguruan Tinggi/Institut	6	1.240.000.000
8	Lembaga Pendidikan Lainnya	32	8.110.800.000
9	Lembaga Sosial Lainnya	18	726.350.000
	Total	362	33.047.150.000

Sumber: <https://data.ntbprov.go.id>

Kebanyakan yayasan memberikan informasi mengenai lingkup organisasi mereka secara umum saja, seperti kegiatan yang telah dan akan dilakukan serta jenis kegiatan yang dilakukan, dan open donasi. Informasi kegiatan yang dilakukan diposting melalui website yang secara umum digunakan masyarakat dengan mencantumkan no kontak yang dapat dihubungi. Dilihat dari sisi akuntabilitas, terutama laporan keuangan, kebanyakan yayasan tidak melampirkan laporan keuangan mereka ke publik, kecuali dalam kasus tertentu (hanya satu yayasan, misalnya yayasan pendidikan yang dikelola oleh asing) di NTB yang melampirkan laporan keuangan dalam websitenya sejak Tahun 2018 s/d 2020. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.755.000.000 bagi 174 yayasan, hanya sekitar 1 (satu) yayasan yang memublikasikan laporan keuangannya kepada publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ebrahim (2003); Goddard dan Assad (2006), dan Kovach *et al.* (2003) mengenai minimnya penyajian informasi mengenai aktivitas organisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) perusahaan merupakan media yang dikelola *agent* yang disewa *principal* untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya menurut teori *stakeholder*, *agent* disewa oleh *principal* tidak hanya dituntut bertanggung jawab kepada pihak *principal* (donor) saja namun lebih luas meliputi masyarakat yang terlibat (Atack, 1999; Kovach *et al.*, 2003; Goddard, 2004).

KESIMPULAN

Keberadaan organisasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan individu dan kelompok di sekitarnya seperti konsumen, kreditur, dan pemerintah. Semua pihak baik secara langsung atau tidak langsung menentukan kelangsungan hidup organisasi. Begitu pula dengan organisasi sosial seperti yayasan. Konsep pemikiran tersebut memiliki makna yang luas karena keberadaan organisasi tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan masyarakat sehingga masyarakat memiliki hak dan klaim terhadap organisasi. Konsep ini disebut sebagai konsep demokrasi yang berarti rakyat memerintah, karena tujuan organisasi untuk menyejahterakan masyarakat, organisasi harus memerhatikan keinginan masyarakat, misalnya melalui diskusi sebelum mengambil keputusan, bukan sebaliknya. Dalam hal ini terlihat masyarakat memiliki hak menentukan masa depannya.

REKOMENDASI

Sumber pendanaan yayasan banyak berasal dari sumbangan donatur sehingga donatur memiliki kemampuan memengaruhi kegiatan organisasi. Donatur dapat memberikan bantuan dengan berbagai alasan, baik untuk kepentingan umum maupun untuk tujuan tertentu. Pada akhirnya pihak masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan akan menerima konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan sebuah mekanisme akuntabilitas oleh donatur kepada masyarakat mengenai tujuan mereka memberdayakan masyarakat melalui organisasi, misalnya melalui diskusi antara donatur dan masyarakat sebelum kegiatan dilakukan sehingga kedua pihak dapat mengetahui maksud dan kebutuhannya. Seluruh mekanisme tersebut merupakan mekanisme demokratis dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat, organisasi, dan donatur untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya masing-masing.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atack, I. (1999). Four Kriteria of Develloperment NGO Legitimacy. *World Develoerment*, Vol. 27, pp. 855-864.
- Brown, L. D. & Mark, H. M. (2001) *Accountability, Strategy, and International Non Governmental Organization. Working Paper, Harvard University.*
- Creswell, J. & Guetterman, T. (2018). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, 6th Edition.* New York: Pearson.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Keempat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dixon., Rob., John, R., & Juliana, S. (2006) Microfinance: Accountability From the Grassroots. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol.19, No.3. pp.405-427.
- Ebrahim, A. (2003), Accountability In Practice: Mechanism for NGOs, *World Development*, Vol. 31 No. 5, pp. 813-29.
- Fries, R. (2003), "The legal environmental of civil society", in Kaldor, M., Anheier, H. and Glasius, M. (Eds), *Global Civil Society 2003*, Oxford
- Gibelman, M., & Sheldon, R. G. (2001). Very Public Scandals: Nongovernmental Organizations in Trouble. *Internasional Jurnal of Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. 12(1), 49– 66.
- Goddard, A. & Mussa, J. A. (2006). Accounting and Navigating Legitimacy in Tanzanian NGO. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 19 No. 3, pp. 377-404.
- Gray., Rob., Jan, B., & David, C. (2006) NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 19, No.31. pp. 319-348.
- Jensen., Michael, C. & William, H. M. (1976), Teory of the Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost and Owership Structure. *Jurnal of Financial Economics*. October, 1976, V.3 No.4, pp.305-360.
- Kaldor, M. (2003). Civil Society and Accountability. *Journal of Human Development*. Vol. 4 No. 1.
- Kovach, H., Caroline, N., & Simon, B. (2003), Power Without Accountability? The Global Accountability Report 1, One World Trust, London, pdf download available at: www.oneworldtrust.org/htmlGAP/report.
- Lehman, G. (1999). Disclosing New Worlds: A Role for Social and Environmental Accounting and Auditing. *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 24 No. 3, pp. 217-42.
- Lehman, G. (2005). A Critical Perspective on the Harmonisation of Accounting In A Globalising World, *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 16, pp. 975-92.
- Yamin, M. (2022). LSM di Tengah Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi. <https://boyanesia.republika.co.id/posts/145990/lsm-di-tengah-tuntutan-akuntabilitas-dan-transparansi>.